

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PENUNTUN TINDAKAN (ACTION GUIDE) PADA ASPEK ETIS (ETIKA) DALAM ADMINISTRASI.

Musdalifah

Stia Al Gazali Barru | musdalifah@algazali.ac.id

ABSTRAK

Manusia sebagai materi dasar administrasi. Manusia merupakan sumber adanya administrasi. Kelahiran administrasi ditentukan oleh pengejaran tujuan bersama secara kolektif dengan mencari sistem-sistem yang bisa memenuhi kebutuhan yang berguna. Karena itu pula tujuan administrasi adalah semata-mata untuk kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Maka konsekwensinya administrasi bertanggungjawab terhadap kelangsungan organisasi sosial dengan segala kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan. Itulah sebabnya disebut, administrasi sebagai suatu fenomena sosial, dan hidup subur di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di dalam tingkat kehidupan yang demikian, individu mempunyai peranan sentral dan penting. Karena sebenarnya masyarakat adalah bentuk hubungan antar individu dalam suatu sistem, untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu setiap individu berfungsi sebagai sumberdaya masyarakat, sekaligus sumberdaya administrasi. Di dalam inti administrasi terkandung di dalamnya beberapa konsepsi, seperti manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, human relation, dan manusia itu sendiri, di dalam wadah yang disebut organisasi (birokrasi). Hakikat yang terdalem dalam administrasi sebenarnya adalah pelayanan, di mana manusia sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek. Jadi yang melayani adalah manusia dan yang dilayani juga adalah manusia pula. Sehingga

unsur utama dalam administrasi adalah manusia dalam kelompok, proses kegiatan dan tujuan yang akan dicapai.

Kata Kunci: Kearifan, budaya, administrasi, etika

A. PENDAHULUAN

Etika juga sering difahami secara terkait dengan "moral". Sehingga dalam beberapa hal orang awan tidak dapat membedakan antara etika dan moral. Menurut Widjaya (1999) perkataan moral berasal dari bahasa Latin yaitu "mores" yang berasal dari "mos" (tunggal) yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan dalam arti susila. Sering juga diartikan sebagai "dorongan batin" atau "semangat batin" untuk melakukan sesuatu perbuatan. Secara harfiah istilah moral sebenarnya berarti sama dengan istilah etika, tetapi dalam prakteknya istilah moral atau moril sebenarnya telah jauh berada dari harfiahnya. Menurut Soeharyo dan Fernanda (2003 : 9), bahwa Moral atau moralitas dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral atau moralitas ini dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi tertentu

sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan Moral sering pula dikenal sebagai "norma etika" atau "norma moral" yang dipakai sebagai ukuran - haluan - atau pedoman tingkahlaku yang seharusnya dilakukan. Kalau tidak dilakukan, disebut sebagai tidak etis atau tidak bermoral. Des Vos (1987) mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan dan moral. Sedangkan moral adalah hal-hal yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban untuk norma. Kemudian istilah moralitas yang dimaksudkan untuk menentukan sampai sejauhmana seseorang mempunyai dorongan untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Jadi "moral" mendorong adanya perilaku-perilaku yang baik sebagai kewajiban. Perilaku demikian mengandung suatu moral yang bertanggungjawab terhadap norma-norma kebaikan. Walaupun secara sepintas menyimpulkan etika dan moral adalah sama, namun dari beberapa ahli mengemukakan perbedaan yang menonjol. Widjaya (1999 : 18) menekankan bahwa etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis.

Pandangan ahli-ahli filsafat menilai etika secara universal, sedangkan moral secara lokal (terbatas).

Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Widjaya (1999) menekankan bahwa moralitas bertolak pada ilmu pengetahuan kognitif bukan pada afektif. Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan semangat kelompok masyarakat. Moralitas terjadi bila ada masyarakat. Tidak ada moral bila tidak ada masyarakat dan seyogyanya tidak ada masyarakat tanpa moral, dan ini berkaitan dengan kesadaran kognitif. Perbedaan antara etika dan moral masih diperbincangkan dikalangan para ahli. Moralitas tampak cenderung lebih merujuk kepada nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau sesuatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan etika lebih merupakan nilai-nilai perilaku yang ditujukan oleh seseorang atau sesuatu organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan. Moralitas dengan demikian dapat melatar belakangi etika seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Tetapi antara moralitas dengan nilai-nilai etika dapat saja tidak sejalan atau bertentangan. Perbedaan antara etika dan moral, terutama : Yang pertama bahwa etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari

tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Kedua, yaitu etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertian umum menaruh penekanan kepada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, diluar ketaatan kepada persatuan. Maka moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. Moralitas berfokus kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Orang yang mengingkari janji yang telah diucapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak etis, tetapi bukan berarti tidak bermoral. Contoh lain : Misalnya, "tidak membayar hutang adalah tidak etis, tetapi belum tentu orang tersebut tidak bermoral. Mungkin hanya karena belum ada kemampuan untuk mengembalikannya saja. Memaki orang tua adalah tidak etis – tetapi menyiksa dan membunuhnya adalah perbuatan tidak bermoral. Tidak membayar pajak adalah perbuatan tidak etis – tetapi korupsi, manipulasi,

intimidasi dan sebagainya adalah perbuatan yang tidak bermoral.

Dalam persoalan yang sama Frankena (1984 : 4) mengemukakan bahwa etika (ethics) adalah salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofi (phylosophical judgment). Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Dan moralitas merupakan salah satu instrumen kemasyarakatan apabila suatu kelompok sosial menghendaki adanya penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral. Maka moralitas akan serupa dengan hukum di satu pihak dan etika (etiket) di pihak lain. Tetapi bertalian dengan etiket, moralitas memiliki pertimbangan-pertimbangan jauh lebih tinggi tentang apa yang disebut "kebenaran" dan "keharusan", Moralitas juga dapat dibedakan dari sudut hukum, sebab tidak tercipta atau tidak dapat diubah melalui tindakan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sanksi yang dikenakan oleh moralitas tidak seperti pada norma hukum yang melibatkan paksaan fisik ataupun ancaman, melainkan lebih bersifat internal, misalnya isyarat-isyarat verbal, rasa bersalah, sentimen, atau rasa malu.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut makin jelas sebenarnya bagaimana konsepsi etika dan moralitas serta perbedaan diantara kedua istilah tersebut. Secara konseptual, istilah etika memiliki kecenderungan dipandang sebagai suatu sistem nilai apa yang baik dan buruk bagi manusia dan masyarakat. Dalam implementasinya, penggunaan istilah etika banyak dikembangkan dalam suatu sistem organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur profesionalisme seseorang, misalnya etika bagi aparatur administrasi negara, etika kedokteran, etika jurnalistik, dan sebagainya. Konsepsi moralitas disisi yang lain, dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral. Tingkat moralitas seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, agama, pengalaman, dan karakter individu adalah sebagai diantara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moralitas seseorang.

Menurut Supriyadi, (2001 ; 6) bahwa: dorongan untuk mencari kebenaran dan kebaikan senantiasa ada pada diri manusia, yang membedakan tingkat moralitas adalah kadar atau kuat tidaknya dorongan tersebut. Setelah menjelaskan arti dan makna

etika dan moral, maka kita sudah dapat mengerti bahwa antara etika dan moral tampak memiliki persoalan yang cenderung sama, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh manusia dalam mengatur tingkah laku dan perbuatannya. Akan tetapi sebenarnya “moral” ada secara niscaya pada diri setiap orang, terlepas dari ada atau tidaknya norma-norma atau peraturan-peraturan. Setiap kecenderungan spontan manusia untuk berbuat atau tidak berbuat adalah “moral”. Misalnya : cinta kasih, murah hati, persahabatan, kebangsaan dan sebagainya.

Sedangkan etika adanya lebih konkrit dan terikat oleh situasi, kondisi, kepentingan, dan kebutuhan tertentu. Jadi pada diri manusia , adanya melekat secara aksidensial, lebih bersifat kebetulan. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa setiap orang pastilah bermoral, tetapi belum tentu ber-etika. Etika merupakan salah satu unsur filsafat ilmu pengetahuan, yang sering disebut “etis” yakni berisikan tentang perilaku yang adil dan bertanggungjawab bagi seluruh warga masyarakat. Dalam kaitannya dengan administrasi negara maka dalam hal ini khususnya para administrator/birokrat (pejabat-pejabat negara) terhadap keseluruhan sistem kerjasama dalam rangka mencapai tujuan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan Nilai-nilai kearifan lokal pada etika (moralitas). Pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam buku (*in books*).

C. PEMBAHASAN

Aspek etis(etika)dalam administrasi berisikan tentang perilaku administrasi yang adil dan bertanggungjawab kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para administrator / birokrat terhadap keseluruhan sistem kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan. Etika administrasi adalah pertanggungjawaban administrasi secara etis, dan secara moral kepada masyarakat.

Etika mengandung dua unsur pokok, yaitu :

1. Etika adalah sistem-sistem yang terangkai secara teratur dalam suatu entitas yang utuh, sehingga terbentuklah suatu norma umum. Norma ini selanjutnya menjadi pedoman dasar bagi tingkah laku sosial pada umumnya.

2. Etika adalah tingkah laku bertanggungjawab setiap individu baik secara bersama-sama terhadap norma umum itu demi tercapainya tujuan, sehingga nilai kebaikan benar-benar aktual adanya.

Dalam realita konkret (menurut hakikatnya) administrasi mengandung banyak tingkatan sistem, Mulai dari sistem perencanaan, sistem pengorganisasian, sistem koordinasi, sistem pelaksanaan (implementasi), sampai kepada sistem pengawasan dan evaluasi. Keseluruhan sistem itu di dalam administrasi disebut sistem manajemen dimana biasanya didukung dan dipertanggungjawabkan oleh komponen “administrator” yang terkoordinir dalam suatu badan yang disebut “birokrasi”. Setiap birokrat adalah administrator yang berkewajiban untuk menggerakkan sistem kerjasama untuk mempertanggungjawabkan tercapainya tujuan. Artinya di dalam proses administrasi, maka para administrator atau birokrat-birokrat itu seharusnya mampu menggerakkan seluruh sistem perilaku ke arah pencapaian tujuan organisasi atau tujuan sosial semata.

Untuk dapat mengembangkan perilaku yang demikian maka seharusnya para administrator atau

birokrat bersikap terbuka, adil, otonom, kritis dan kreatif. Lebih dari pada itu, secara moral, para administrator atau birokrat seharusnya mau dan mampu menjaga dan mengembangkan suasana dan kondisi sosial birokrasi yang demokratis berkeadilan. Sebab azas demokrasi berkeadilan dapat membentuk suatu sistem birokrasi ke arah pertumbuhan dan pengembangan sikap dan perbuatan etis yang mampu bertanggungjawab atas tujuan sosial, menurut dasar nilai keadilan. Di mana keadilan adalah “prinsip moral” berupa kesediaan memberikan atau melakukan perbuatan apa yang seharusnya diberikan atau dilakukan kepada yang lain. Dengan keadaan yang demokratis ini maka seluruh sistem akan dapat digerakkan secara intensif, efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan.

Dalam rangka mengembangkan tingkah laku ilmiah obyektif itu, dalam prakteknya tidaklah mudah. Adapun kendala besar yang sering terjadi adalah justru bersumber dari “nafsu-nafsu” dan “kemauan-kemauan” pribadi yang berkembang menjadi pelbagai kepentingan pribadi / kepentingan kelompok dalam birokrasi administrasi. Kepentingan ini biasanya berupa “kekuasaan politik” dan “ekonomi” dari sementara administrator. Kepentingan pribadi / kelompok atas kekuasaan politik, bisa

mengganggu dan menghambat atau “membelokkan arah” mekanisme proses kerjasama antara unit-unit kerjasama, sehingga tidak efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan. Karena kepentingan kekuasaan tersebut, bisa mengakibatkan perencanaan menjadi ditentukan oleh seorang penguasa (yang sering tidak sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai), begitupula pengorganisasiannya bisa disusun secara tidak adil dan tidak obyektif, misalnya penempatan pejabat pada jabatan tertentu bukan lagi sesuai keahliannya dan kemampuan kerjanya, tetapi hasil kolusi dan nepotisme yang merugikan organisasi/ pihak lain. Sehingga organisasi menjadi kaku, yakni hanya bergerak dari atas ke bawah, pengawasan bisa hanya bersifat fisik semata dan pelaksanaan kegiatan tidak diwarnai oleh etos kerja yang baik serta evaluasi dibuat hanya secara semu dan artifisial belaka.

Adapun kepentingan pribadi atas ekonomi, bisa membuahkan segala macam penyelewengan dana dan daya (KKN), yakni banyak pejabat birokrasi yang tidak etis/tidak bermoral dalam melaksanakan tugas. Hal ini sering pula dilakukan secara berkelompok, bukan hanya di pusat pemerintahan tetapi justru dapat merambah di tingkat pemerintahan lokal (daerah). Persoalannya adalah bagaimana

kepentingan-kepentingan pribadi demikian itu bisa dicegah dan diatasi?. Untuk mencegahnya – tidak ada jalan lain kecuali dikembalikan pada kondisi sosial moral organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah penataan sistim pendidikan dan sosial yang lebih berkualitas. Maksudnya, bagaimana kualitas tingkat pendidikan masyarakat sebagai dasar terbentuknya suatu tatanan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Kondisi sosial yang demokratis berkeadilan adalah faktor lingkungan sosial yang penting dan turut menentukan bagi adanya suatu “birokrasi yang demokratis berkeadilan” pula. Jika lingkungan sosial yang demokratis berkeadilan itu aktual, maka kritik sosial akan tumbuh dan berkembang secara fungsional efektif dan efisien memberikan kontrol terhadap mekanisme birokrasi, sehingga tetap konsisiten terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, di dalam kepemimpinan administrasi perlu menerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang baik yaitu, adil, suka melindungi, penuh inisiatif, penuh daya tarik, penuh kepercayaan pada diri sendiri. Selain daripada itu perlunya dikembangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, termasuk budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal suku Bugis Makassar misalnya dalam konsep kepemimpinan

dikenal istilah “Ajoareng = panutan”, di dalam konsep pengambilan keputusan dikenal “Getteng” yakni pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang benar dalam semua situasi dan kondisi apapun. “Lempu” atau kejujuran dalam bekerja, Nilai “siri na pacce”. Malu berbuat kesalahan, dan tidak sampai hati membuat orang lain menderita. Di dendangkan lagu : “Iyya teppaja kusappa paccoli loloengi aju marakkoe”, maknanya bahwa orang senantiasa dicari adalah yang mempunyai kemampuan kerja, jujur, bersih dan berwibawah, yang melakukan modernisasi dan reformasi dalam masyarakat menuju kemajuan yang diharapkan. Selain daripada itu dalam sebuah pantun disebutkan bahwa “tellumi teppaja kusappa, unganna panasae, belona kanukue, pattompang aje tedong”, maksudnya : hanya tiga yang selalu saya cari yaitu unganna panasae (lempu) artinya jujur (kejujuran), kemudian belona kanukue (penghias kuku) yaitu pacci = paccing, artinya bersih, dan pattompang aje tedong (tempat asahan kakinya kerbau), yaitu pasir artinya kessi = kessing (baik - kebaikan), Jadi pejabat / aparatur negara yang dicari adalah yang, jujur, bersih dan mampu serta senantiasa berbuat baik yang bebas dari perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti korupsi (merampok di kantornya), kolusi dan

nopotisme. Untuk mewujudkan etika dan moral dalam administrasi maka konsepsi yang diatur dalam semua agama perlu diterapkan dalam proses administrasi, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, dan jangan minum arak (sekarang minuman keras, narkotik dan sejenisnya) yang memabukkan.

Nilai-nilai tradisional yang selama ini merupakan perekat masyarakat ternyata sudah mulai luntur. Misalnya : nilai Lempu, Paccing, dan Kessing, Getteng, dan Ajoareng. Dalam kehidupan birokrasi yang sudah dipengaruhi KKN, kita dapat menyaksikan pejabat yang korupsi dengan tidak malu mempertontongkan hasil korupsinya (hasil rampokan) seperti mobil mewah, rumah mewah dan barang-barang mewah lainnya. Banyak pengusaha yang tidak malu lagi disebut sebagai peminjam uang Bank (Kredit) dengan jumlah besar, kemudian uang kredit itu dihaburkan untuk keperluan konsumtif, kemudian utangnya tidak mampu ia mengembalikan. Seharusnya malu berbuat seperti itu. Ini berarti nilai “siri na pacce” sudah mulai luntur dikalangan masyarakat. Jadi di dalam etika administrasi memang bukan hanya masalah etis dan moral yang sudah diatur dan dibakukan, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai budaya, tradisional (Kearifan Lokal)

dan adat istiadat (Kearifan Lokal), serta nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakatnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Manusia merupakan sumber adanya administrasi. Kelahiran administrasi ditentukan oleh pengejaran tujuan bersama secara kolektif dengan mencari sistem-sistem yang bisa memenuhi kebutuhan yang berguna. Karena itu pula tujuan administrasi adalah sematamata untuk kepentingan manusia.
- Setiap birokrat adalah administrator yang berkewajiban untuk menggerakkan sistem kerjasama untuk mempertanggungjawabkan tercapainya tujuan. Artinya di dalam proses administrasi, maka para administrator atau birokrat-birokrat itu seharusnya mampu menggerakkan seluruh sistem perilaku ke arah pencapaian tujuan organisasi atau tujuan sosial semata.
- Perlunya dikembangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat (Kearifan Lokal), termasuk budaya lokal.

Nilai-nilai budaya lokal suku Bugis Makassar misalnya dalam konsep kepemimpinan dikenal istilah “Ajoareng = panutan”, di dalam konsep pengambilan keputusan dikenal “Getteng” yakni pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang benar dalam semua situasi dan kondisi apapun. “Lempu” atau kejujuran dalam bekerja, Nilai “siri na pacce”. Malu berbuat kesalahan, dan tidak sampai hati membuat orang lain menderita. Di dendangkan lagu : “Iyya teppaja kusappa paccolli loloengi aju marakkoe”, maknanya bahwa orang senantiasa dicari adalah yang mempunyai kemampuan kerja, jujur, bersih dan berwibawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson. Ivancevich, Donnelly, 1991, Organisasi Prilaku, Erlangga, Jakarta.
- Mukmin Muhammad, 2017, Etika Administrasi Negara, Deepublish, Yogyakarta.
- , 2017, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Samudra biru, Yogyakarta.
- Mustopadidjaja AR, 1997, Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi, Jakarta, PP. Persadi

Salamon Soeharyo dan Desi Fernanda, 2003, Etika Organisasi Pemerintah, LAN, RI, Jakarta

Jurnal

Kamaruddin Hasan, 2017, School Cultural In Behavioral Organization Perspective (Review Of The Axiology Education Attainment) <https://www.journalcra.com/article/school-cultural-behavioral-organization-perspective-review-axiology-education-attainment>

Mukmin Muhammad, 2018, Aparatur Kepegawaian Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) Dengan konsep Negara hukum (Rechtsstaat), <http://latihanojs.jurnalindonesia.org/index.php/sulsel/article/view/59>

Mukmin Muhammad, 2018, Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/7>

Mukmin Muhammad, 2018, General Principles of Good Governance in State Civil Apparatus Law <http://www.ijird.com/index.php/ijird/article/view/130520>